

Rencana Kerja (RENJA)

TAHUN 2022



KAPUAS HULU

DINAS SOSIAL

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPAEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif dengan data yang akurat, lengkap, aktual dan relevan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja ini dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, dengan demikian tugas yang di fasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dibidang pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

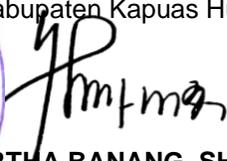
Akhirnya kami berharap, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 guna mendukung tujuan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Putussibau, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu




MARTHA BANANG, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2020	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	27
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Kapuas Hulu	11
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	20
Tabel 2.3	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring Evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020	22
Tabel 2.4	Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020	23
Tabel 2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	
Tabel 2.7	Usulan Program Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan tahun 2020 Kabupaten Kapuas Hulu	
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/ Kota	
Gamabr 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran	
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja OPD berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah diawali proses validasi data Program/Kegiatan prioritas utama dalam pelaksanaan tupoksi pada tahun 2022 yang berorientasi pada kelanjutan hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, yang telah terarah dalam RPJMD Tahun 2022-2026 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026.

Renja OPD merupakan bagian dari dokumen strategis pelaksanaan perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat tentang kebijakan program/kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan baik dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Instrumen kebijakan yang telah tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, partisipatif, akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renja OPD ini memenuhi unsur dari aspek perencanaan yang diarahkan semaksimal mungkin dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang diwujudkan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Utama, hal ini tentunya didukung oleh kebijakan anggaran yang seimbang.

Renja OPD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.1.1. Pengertian Renja

Rancangan Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya operasional. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik .

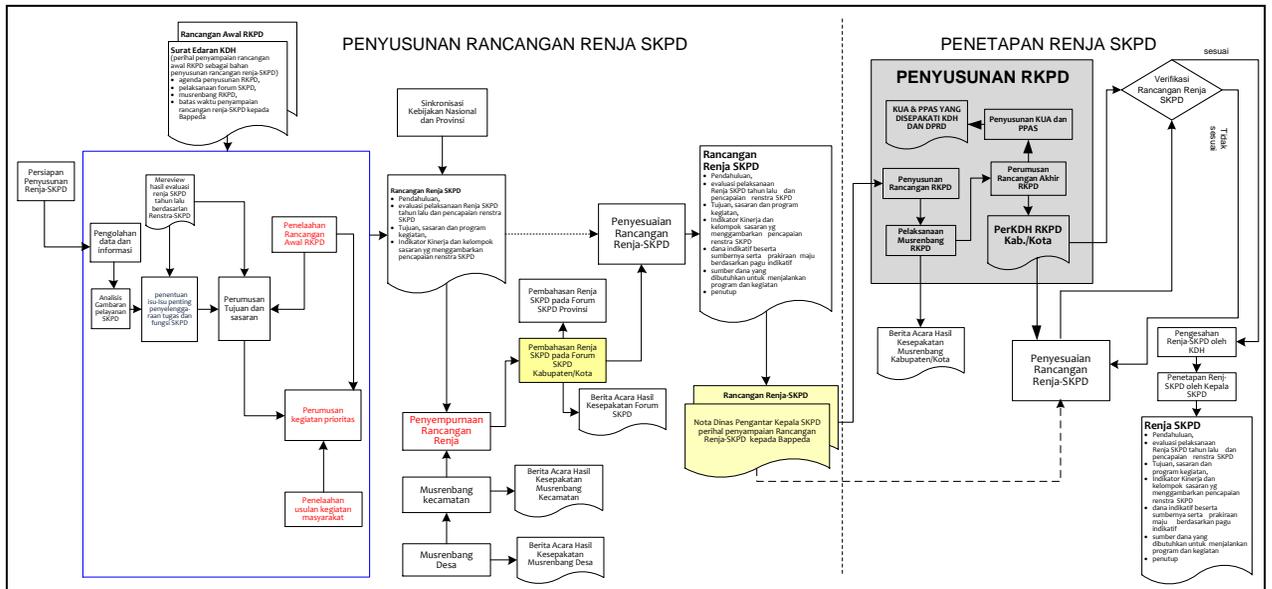
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan dan urusan pelayanan wajib/pilihan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/ Kota

Adapun Gambaran Penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi Mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

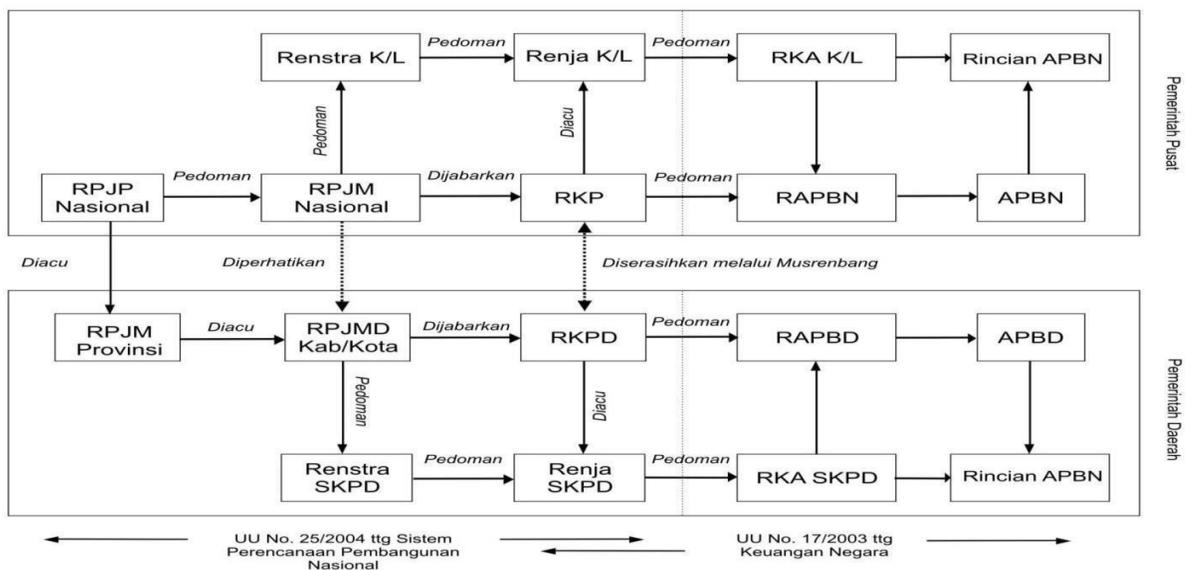
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisa gambaran pelayanan OPD;
- Mereview evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

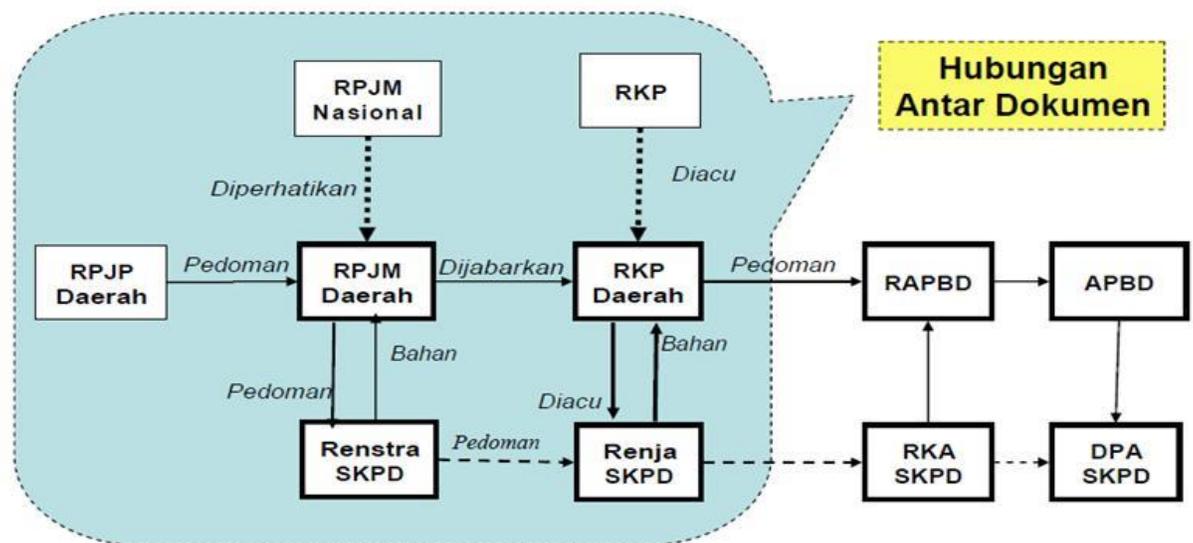
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu bagian dari penjabaran dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD, yang kemudian akan diolah menjadi RKA OPD dan Penjabaran APBD.

Jadi secara garis besar Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pemberdayaan masyarakat sangat kuat keterkaitan kebijakan umum anggaran, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 sekaligus berfungsi

secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, bagi segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Dalam Negeri;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
20. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang akan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen awal mekanisme penganggaran sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022.

Disamping itu, juga sebagai dasar mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD 2022-2026 agar terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah untuk memetakan

kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan program Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan Sasaran Renja; dan Program Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2020 berdasarkan target indikator kinerja program adalah sebagai berikut;

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Jaminan Sosial;
6. Program Pemberdayaan Sosial;
7. Program Rehabilitasi Sosial;
8. Program Perlindungan Khusus Anak;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
10. Program Perlindungan Perempuan;

b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Jaminan Sosial;
6. Program Pemberdayaan Sosial;
7. Program Rehabilitasi Sosial;
8. Program Perlindungan Khusus Anak;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
10. Program Perlindungan Perempuan;

c. Realisasi program/kegiatan yang tidak melebihi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Jaminan Sosial;
6. Program Pemberdayaan Sosial;
7. Program Rehabilitasi Sosial;
8. Program Perlindungan Khusus Anak;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
10. Program Perlindungan Perempuan;

Pada tahun 2020 anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp14.021.479.568,- dimana anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran DAK sebesar Rp6.707.776.000 dan APBD sebesar Rp7.313.703.560.

Tabel 1.1 T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
				K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendapatan				-		-		
	Belanja Tidak Langsung								
1.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasinya	Angka		876.631.370				
1.01.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36 Bulan	1.050.000	86,15%	1.689.999	86,15%	1.689.999
1.01.06.01.01.02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran		2 Mobil, 20 Bulan	61.360.000	83,14%	52.345.154	83,14%	52.345.154
1.01.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2		85%	8.700.000	68,14%	5.928.000	68,14%	5.928.000
1.01.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		3 Orang	81.660.000	100%	81.660.000	100%	81.660.000
1.01.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Pengamanan dan Kebersihan Kantor		85%	57.389.500	100%	57.389.500	100%	57.389.500
1.01.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		85%	6.650.000	79,47%	5.284.500	79,47%	5.284.500
1.01.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase jumlah ATK		95%	32.154.650	96,07%	37.669.650	96,07%	37.669.650

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan		95%	17.980.000	56,53%	10.249.500	56,53%	10.249.500
1.01.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90%	6.000.000	99,85%	48.775.000	99,85%	48.775.000
1.01.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman		95%	62.230.000	99,97%	62.209.000	99,97%	62.209.000
1.01.06.01.01.18	Rapat- Rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase ASN yang mengikuti rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		95%	214.072.220	96,39%	177.420.811	96,39%	177.420.811
1.01.06.01.01.19	Rapat- Rapat Kooordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah		95%	84.100.000	96,09%	70.240.000	96,09%	70.240.000
1.01.06.01.01.26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ASN yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa		90%	23.031.000	68,73%	15.830.000	68,73%	15.830.000
1.01.06.01.01.27	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase ASN yang menangani Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD		95%	9.905.000	98,28%	9.734.700	98,28%	9.734.700
1.01.06.01.01.31	Penyusunan RKA – DPA	Jumlah Dokumen	Tahun	2 Dokumen	9.396.000	100%	9.396.000	100%	9.396.000
1.01.06.01.01.36	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pendukung Adminstrasi Kantor		4 Orang	165.953.000	100%	165.953.000	100%	165.953.000
1.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi “BAIK”							

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas		1 Tahun	61.030.000	89,29%	52.030.000	89,29%	52.030.000
1.01.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1 Tahun					
1.01.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		1 Tahun	45.106.200	100%	45.106.200	100%	45.106.200
1.01.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 Dokumen	19.270.500				
1.01.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	2.947.500	100%	2.947.500	100%	2.947.500
1.01.06.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	2.185.000	100%	2.185.000	100%	2.185.000
1.01.06.01.06.30	Penyusunan rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	2.733.000	100%	2.733.000	100%	2.733.000
1.01.06.01.06.31	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	8.112.000	99,73%	8.090.250	99,73%	8.090.250

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.06.36	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.293.000	100%	3.293.000	100%	3.293.000
1.01.06.01.15	Program Perlindungan Jaminan Sosial			-					
1.01.06.01.15.09	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/ Orang Terlantar	Jumlah pendataan PMKS dan PSKS		-	218.572.950	81,71%	178.597.950	81,71%	178.597.950
1.01.06.01.15.10	Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu			-	2.800.000.000	73,08%	2.956.933.650	73,08%	2.956.933.650
1.01.06.01.15.11	Mobilisasi dan Perindustrian bantuan Sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial		-	35.601.740	99,66%	21.529.000	99,66%	21.529.000
1.01.06.01.15.12	Koordinasi, Konsultasi Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	koordinasi dan sinkronisasi masalah kesejahteraan social		1 Tahun	88.201.228	100%	88.081.228	100%	88.081.228
1.01.06.01.15.13	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai			1 Tahun	25.126.000	94,85%	23.832.000	94,85%	23.832.000
1.01.06.01.15.14	Pembinaan Program Keluarga Harapan			50 Orang	88.760.000	99,67%	88.470.000	99,67%	88.470.000
1.01.01.01.16	Program Pemberdayaan Sosial			-					

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.16.08	Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna, dan Organisasi Sosial Lainnya			27 Orang	467.271.000	91,29%	426.592.000	91,29%	426.592.000
1.01.06.01.16.11	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	Jumlah Makam Pahlawan		1 Tahun	99.917.000	54,45%	42.940.000	54,45%	42.940.000
1.01.06.01.17	Program Rehabilitas Sosial								
	Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial			-	600.000	100%	600.000	100%	600.000
1.01.06.01.17.16	Pelayanan Penyandang Cacat dan penyakit Kejiwaan	pemberdayaan dan bimbingan terhadap penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang penyakit kejiwaan		-	347.929.000	93,05%	379.816.471	93,05%	379.816.471
1.01.06.01.17.18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar			-	26.478.000	92,96%	24.613.000	92,96%	24.613.000
1.01.06.01.18	Program Perlindungan Khusus Anak								
1.01.06.01.18.02	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah			125 Orang	74.820.000	67,25%	50.318.000	67,25%	50.318.000
1.01.06.01.18.04	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional		-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.18.05	Penguatan Kelembagaan KLA			1 Lembaga	13.647.4000	87,02%	11.876.000	87,02%	11.876.000
1.01.06.01.19	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan								
1.01.06.01.19.06	Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga			100 Orang	124.583.000	99,72%	121.283.200	99,72%	121.283.200
1.01.06.01.19.07	Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan			-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.19.08	Peringatan Hari Kartini	Jumlah peserta		-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.19.09	Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit			-	145.000.000	99,98%	144.970.000	99,98%	144.970.000
1.01.06.01.19.10	Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Tata Boga			-	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
1.01.06.01.20	Program Perlindungan Perempuan								
1.01.06.01.20.05	Sosialisasi UU PKDRT dan UU Trafficking			120 Orang	25.584.500	86,87%	22.224.500	86,87%	22.224.500

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.21	Program Keluarga Berencana	a. Prevalensi KB Aktif b. Angka kelahiran Total (Total fertility Rate/ TFR)							
1.01.06.01.21.03	Pembangunan Balai Penyuluh KB			4 Unit	475.000.000	63,30%	455.720.500	63,30%	455.720.500
1.01.06.01.21.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Balai Penyuluh KB				310.000.000	99,95%	64.965.000	99,95%	64.965.000
1.01.06.01.21.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Tersalurnya bantuan operasional keluarga berencana		14 Paket	4.651.078.995	76,89%	4.554.106.850	76,89%	4.554.106.850
1.01.06.01.21.09	TNI Manunggal KB-KES (TMKK)	Jumlah Peserta KB baru yang dilayani		312 Akseptor	47.511.680	76,41%	25.805.000	76,41%	25.805.000
1.01.06.01.21.10	Kesatuan Gerak Bhayangkara - KB-Kesehatan	Jumlah Peserta KB baru yang dilayani		-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.21.11	Kesatuan Gerak PKK – KB-Kesehatan	Jumlah Peserta KB baru yang dilayani		273 Akseptor	60..270.000	96,51%	66.605.000	96,51%	66.605.000
1.01.06.21.21.12	Kampung KB	Jumlah desa yang ditetapkan kampung KB		35 Desa	96.405.000	94,51%	77.787.000	94,40%	77.787.000
1.01.06.01.22	Program Keluarga Sejahtera								
1.01.06.01.22.05	Pembinaan Operasional Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja	Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan		-	31.490.000	35,11%	7.790.000	35,11%	7.790.000
1.01.06.01.22.06	Pameran reproduksi UPPKS dan HARGANAS	Cakupan pengembangan dan promosi kegiatan UPPKS		1 Kelompok	35.800.000	86,11%	28.930.000	86,11%	28.930.000
1.01.06.01.22.07	Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli KB			16 Kelompok	20.089.000	96,96%	19.479.000	96,96%	19.479.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.01.25	Program Pengendalian Penduduk								
1.01.06.01.25.07	Sosialisasi dampak program Keluarga Berencana terhadap pengendalian penduduk	Meningkatnya pengembangan masyarakat peduli KB		-	-	-	-	-	-
1.01.06.01.25.08	Monitoring dan evaluasi program KKBPK	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KKBPK		30 Orang	17.270.000	95,05%	16.415.000	95,05%	16.415.000
1.01.06.01.25.09 7	Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Terlaksananya sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan		4 Kelompok	47.634.000	99,62%	47.452.600	99,62%	47.452.600
	JUMLAH				11.503.678.563				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus selalu memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap masyarakat. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dibuat dalam bentuk tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 T-C 30

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Predikat SAKIP	B	BB				B	BB	BB	BB	
2.	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	43,85%	44,38%				-	-	-	-	
3.	Rasio KDRT	-	-				-	-	-	-	
4.	Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	-	-				-	-	-	-	
5.	Indeks Pembangunan Gender	-	-				-	-	-	-	
6.	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	0,67%	37,04%				-	-	-	-	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut (Tabel 2.3) dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi / rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1.	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$		
2.	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100 \%$		

Pencapaian Indikator Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	%	B	B	100%
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS	%	80%	80%	73.88%
2.	Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	%	80%	80%	69.56%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Baik/ Sangat Tinggi dengan rata capaian sebesar 100%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja 2020 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Aparatur, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan saat ini antara lain :

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender.
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan.
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan

- gender.
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
 - f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
 - g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
 - h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
 - i. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS)

Kelemahan (WEAKNESSES)

Peluang (OPPORTUNITIES)

Ancaman (THREATS)

Tabel 2.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK	KONDISI PENCAPAIAN SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNAL	

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Program OPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka ditetapkan visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

” Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil ”

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu Yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Prorakyat, serta Ramah Investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu bagi Masyarakat.

Dari lima misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan terdapat pada misi ke dua. Dari misi tersebut tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Persentase PMKS yang tertangani;
- b. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan;

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dengan indikator :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Perempuan
- c. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

a. Sasaran Strategis urusan Sosial

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar
3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Sasaran Strategis urusan PP dan PA

1. Jumlah Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
2. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
4. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur persentase

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017-2022 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

2.5.1. Tujuan

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

2.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Menetapkan Sasaran Sebagai berikut:

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu*

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2022:

Jumlah Program	: 8
Jumlah Kegiatan	: 14
Pagu Indikatif APBD	: 7.896.017.047
Pagu Indikatif APBN/TP	: -
Pagu Indikatif APBN/DAK	: -

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2). Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
- 5). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 6). Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor;
- 7). Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- 8). Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 9). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 10). Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 12). Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- 13). Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 14). Pelaksanaan Jasa Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD;
- 15). Penyusunan RKA - DPA;
- 16). Penyediaan Jasa Pendukung Kantor;
- 17). Pembuatan Website SKPD

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1). Pendidikan dan pelatihan formal;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 3). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan;
- 4). Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 5). Penyusunan Rencana Kerja SKPD;

a. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

- 1). Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan;
- 2). Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- 3). Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar.

b. Program Perlindungan Jaminan Sosial

Kegiatan :

- 1). Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang Terlantar;
- 2). Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3). Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial;
- 4). Koordinasi, Konsultasi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- 5). Pembinaan Program Keluarga Harapan;
- 6). Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Beras Sejahtera.

c. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

- 1). Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah;
- 2). Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Sosial Lainnya

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran 3 : Perlindungan Khusus Anak, Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan

a. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

- 1). Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah;
- 2). Peringatan Hari Anak Nasional;
- 3). Penguatan Kelembagaan KLA;

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Kegiatan :

- 1). Sosialisasi Penguatan POKJA PUG dan Focal Point;
- 2). Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan;
- 3). Peringatan Hari Kartini;
- 4). Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit;

- 5). Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Tata Boga;
- 6). Pelatihan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga;

c. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- 1). Sosialisasi UU PDKRT dan UU Trafficking;
- 2). Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan PATBM.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang berisikan Program dan Kegiatan tahun 2022 telah dibuatkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan perkiraan maju rencana kerja tahun 2023. (Tabel 4.1)

BAB V PENUTUP

1.1. Penutup

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani.

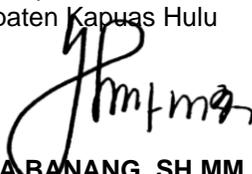
Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan / pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, Desember 2021

Plt.Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu




MARTHA BANANG, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	BB	Rp 3.905.305.585,00	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	BB	Rp 3.332.910.127,00	
	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	Rp 16.300.000,00	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	Rp 16.300.000,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1.RENSTRAS 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	9 Dokumen	Rp 1.800.000,00	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1.RENSTRAS 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	9 Dokumen	Rp 1.800.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000,00	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000,00	
4.	Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1DPA SKPD 2RUP	2 Dokumen	Rp 2.500.000,00	4. Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1DPA SKPD 2RUP	2 Dokumen	Rp 2.500.000,00	
5.	Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	2 Dokumen	Rp 2.500.000,00	5. Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	2 Dokumen	Rp 2.500.000,00	
6.	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	7 Dokumen	Rp 2.000.000,00	6. Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	7 Dokumen	Rp 2.000.000,00	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	8 Dokumen	Rp 2.000.000,00	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	8 Dokumen	Rp 2.000.000,00	
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 laporan	Rp 3.262.520.883,00	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 laporan	Rp 2.679.112.127,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14 laporan	Rp 3.054.760.583,00	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14 laporan	Rp 2.472.297.527,00	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPKom 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara	4 laporan	Rp 194.840.000,00	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPKom 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara	4 laporan	Rp 193.894.600,00	
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	6 laporan	Rp 2.500.000,00	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	6 laporan	Rp 2.500.000,00	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 laporan	Rp 2.500.000,00	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 laporan	Rp 2.500.000,00	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	1 laporan	Rp 3.500.000,00	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	1 laporan	Rp 3.500.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	1 laporan	Rp 1.920.300,00	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	1 laporan	Rp 1.920.000,00	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	5 laporan	Rp 2.500.000,00	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	5 laporan	Rp 2.500.000,00	
	III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Jumlah Dokumen administrasi Umum	9 Dokumen	Rp 146.088.002,00	III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	9 Dokumen	Rp 151.363.800,00	
	1. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik	Kab. Kapuas Hulu	1. Daftar kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2. Laporan Penggunaan komponen Listrik	2 Dokumen	Rp 1.882.000,00	1. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik	Kab. Kapuas Hulu	1. Daftar kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2. Laporan Penggunaan komponen Listrik	2 Dokumen	Rp 1.882.000,00	
	2. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. 1. Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Dokumen	Rp 14.135.000,00	2. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. 1. Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Dokumen	Rp 14.735.000,00	
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kapuas Hulu	3. 1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	2 Dokumen	Rp 20.071.002,00	3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kapuas Hulu	3. 1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	2 Dokumen	Rp 20.070.800,00	
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	2 Dokumen	Rp 110.000.000,00	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	2 Dokumen	Rp 114.676.000,00	
	IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	Rp 469.896.700,00	IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	Rp 471.694.200,00	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah materai	200 Buah	Rp 5.400.000,00	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah materai	200 Buah	Rp 5.400.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	4 Dokumen	Rp 75.200.000,00	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	4 Dokumen	Rp 71.636.000,00	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	20 Dokumen	Rp 4.150.000,00	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	20 Dokumen	Rp 4.150.000,00	
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	1 Dokumen	Rp 385.146.700,00	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	1 Dokumen	Rp 390.508.200,00	
	V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Rp 10.500.000,00	V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		Rp 14.440.000,00	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2. Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2. Laporan pemeliharaan kendaraan dinas		Rp 9.000.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2. Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 3.500.000,00	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2. Laporan pemeliharaan kendaraan dinas		Rp 5.440.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 4.142.957.920,00	B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 4.151.631.920,00	
VI	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	VI Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	0	Rp 4.142.957.920,00	VI Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	VI Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	0	Rp 4.151.631.920,00	
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - BPJS PBI dan Mandiri	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2	Rp 4.063.157.920,00	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - BPJS PBI dan Mandiri	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2	Rp 4.071.831.920,00	
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	Rp 79.800.000,00	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	Rp 79.800.000,00	
	C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 165.600.000,00	C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 165.600.000,00	
VII	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	VII persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 165.600.000,00	VII Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 165.600.000,00	
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	23 kecamatan	Rp 165.600.000,00	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	23 kecamatan	Rp 165.600.000,00	
	D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	80%	Rp 45.000.000,00	D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	80%	Rp 45.000.000,00	
VIII	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti SosialPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	VIII Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	0,00	Rp 45.000.000,00	VIII Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti SosialPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	VIII Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	0,00	Rp 45.000.000,00	
1.	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah yang dirujuk	0	Rp 45.000.000,00	1. Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah yang dirujuk	0	Rp 45.000.000,00	
	E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Kapuas Hulu	E. Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	80 %	Rp 89.000.000,00	E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Kapuas Hulu	E. Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	80 %	Rp 93.875.000,00	
IX	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani		Rp 5.000.000,00	IX Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani		Rp 9.875.000,00	
1.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	10	Rp 5.000.000,00	1. Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	10	Rp 9.875.000,00	
	X Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX. Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	2	Rp 84.000.000,00	X Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX. Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	2	Rp 84.000.000,00	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	35	Rp 84.000.000,00	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	35	Rp 84.000.000,00	
	F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Kapuas Hulu	F. Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100 %	Rp 33.000.000,00	F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Kapuas Hulu	F. Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100 %	Rp 33.000.000,00	
XI	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XI jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2	Rp 33.000.000,00	XI Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XI jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2	Rp 33.000.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2	Rp 33.000.000,00	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2	Rp 33.000.000,00	
	G. PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK	Kab. Kapuas Hulu	G. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KIA)	150	Rp 33.000.000,00	G. PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK	Kab. Kapuas Hulu	G. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KIA)		Rp 33.000.000,00	
	XII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XII Jumlah dokumen		Rp 33.000.000,00	XII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XII Jumlah dokumen		Rp 33.000.000,00	
	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)		Rp 33.000.000,00	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)		Rp 33.000.000,00	
	H. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Kapuas Hulu	H. Persentase peningkatan Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender	120	Rp 41.000.000,00	H. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Kapuas Hulu	H. Persentase peningkatan Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender	120	Rp 41.000.000,00	
	XIII Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIII Jumlah yang ikut pelatihan	120	Rp 41.000.000,00	XIII Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIII Jumlah yang ikut pelatihan	120	Rp 41.000.000,00	
	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah yang ikut pelatihan	120	Rp 41.000.000,00	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah yang ikut pelatihan	120	Rp 41.000.000,00	
JUMLAH					Rp 8.454.863.505,00						Rp 7.896.017.047,00

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KAB. KAPUAS
 HULU



Handwritten signature of Martha Banang, S.H.M.M.

MARTHA BANANG, S.H.M.M.
 NIP. 19651123 199203 2 006

TABEL 2.7

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KABUPATEN KAPUAS

Nomor	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	KAPUAS HULU	3.332.910.127	APBD II
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAPUAS HULU	16.300.000	APBD II
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.RENSTRA 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	KAPUAS HULU	1.800.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1RKA SKPD	KAPUAS HULU	3.000.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Perubahan RKA SKPD	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1DPA SKPD 2RUP	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	KAPUAS HULU	2.000.000	APBD II
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	KAPUAS HULU	2.000.000	APBD II
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAPUAS HULU	2.679.112.127	APBD II
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	KAPUAS HULU	2.472.297.527	APBD II
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPK 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara)	KAPUAS HULU	193.894.600	APBD II
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KAPUAS HULU	3.500.000	APBD II
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	KAPUAS HULU	1.920.000	APBD II
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	KAPUAS HULU	2.500.000	APBD II
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	KAPUAS HULU	151.363.800	APBD II
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.Daftar kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	KAPUAS HULU	1.882.000	APBD II
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAPUAS HULU	14.735.000	APBD II
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	KAPUAS HULU	20.070.800	APBD II
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	KAPUAS HULU	114.676.000	APBD II

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAPUAS HULU	471.694.200	APBD II
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	KAPUAS HULU	5.400.000	APBD II
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	KAPUAS HULU	71.636.000	APBD II
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	KAPUAS HULU	4.150.000	APBD II
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	KAPUAS HULU	390.508.200	APBD II
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAPUAS HULU	14.440.000	APBD II
		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	KAPUAS HULU	9.000.000	APBD II
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	KAPUAS HULU	5.440.000	APBD II
B	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Keluarga Penerima Manfaat	KAPUAS HULU	4.151.631.920	APBD II
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	KAPUAS HULU	4.151.631.920	APBD II
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	KAPUAS HULU	4.071.831.920	APBD II
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KAPUAS HULU	79.800.000	APBD II
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	KAPUAS HULU	165.600.000	APBD II
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	KAPUAS HULU	165.600.000	APBD II
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di Fasilitasi	KAPUAS HULU	165.600.000	APBD II
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	KAPUAS HULU	45.000.000	APBD II
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	KAPUAS HULU	45.000.000	APBD II
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah yang dirujuk	KAPUAS HULU	45.000.000	APBD II
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	KAPUAS HULU	93.875.000	APBD II
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	KAPUAS HULU	93.875.000	APBD II
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	KAPUAS HULU	9.875.000	APBD II
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	KAPUAS HULU	84.000.000	APBD II
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II
G	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	KAPUAS HULU	33.000.000	APBD II

H	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase peningkatan Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender	KAPUAS HULU	41.000.000	APBD II
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang ikut pelatihan	KAPUAS HULU	41.000.000	APBD II
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah yang ikut pelatihan	KAPUAS HULU	41.000.000	APBD II
		JUMLAH			7.896.017.047	APBD II

PLT.KEPALA DINAS SOSIAL
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KAB.KAPUAS HULU



[Handwritten signature]

MARTHA BANANG, S.H.M.M
 NIP. 19651123 199203 2 006

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Rencana Tahun 2023					
				Target	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	100%	415.000.000	APBD II		100%	456.500.000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	37	415.000.000	APBD II		37	456.500.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di Fasilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	23	415.000.000	APBD II		23	456.500.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	Kabupaten Kapuas Hulu	80%	75.000.000	APBD II		80%	82.500.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	100	75.000.000	APBD II		100	82.500.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah yang dirujuk	Kabupaten Kapuas Hulu	100	75.000.000	APBD II		100	82.500.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat	Kabupaten Kapuas Hulu	10,267	4.151.631.920	APBD II		10,47	4.566.795.112

1	06	05	2.02		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kabupaten Kapuas Hulu	1	4.151.631.920	APBD II		2	4.566.795.112
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kabupaten Kapuas Hulu	2	4.071.831.920	APBD II		2	4.479.015.112
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Kapuas Hulu	36,140	79.800.000	APBD II		36,863	87.780.000
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	Kabupaten Kapuas Hulu	80%	93.875.000	APBD II		80%	103.262.500
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kabupaten Kapuas Hulu	2	93.875.000	APBD II		2	103.262.500
1	6	6	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	15	9.875.000	APBD II		20	10.862.500
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	Kabupaten Kapuas Hulu	35	84.000.000	APBD II		35	92.400.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan	Kabupaten Kapuas Hulu	100%	33.000.000	APBD II		100%	36.300.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilaku	Kabupaten Kapuas Hulu	100%	33.000.000	APBD II		100%	36.300.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilaku	Kabupaten Kapuas Hulu	2	33.000.000	APBD II		2	36.300.000

2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender	Kabupaten Kapuas Hulu	120	41.000.000	APBD II			45.100.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang ikut pelatihan	Kabupaten Kapuas Hulu	120	41.000.000	APBD II			45.100.000
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah yang ikut pelatihan	Kabupaten Kapuas Hulu	120	41.000.000	APBD II		120	45.100.000
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	Kabupaten Kapuas Hulu	150	33.000.000	APBD II		200	36.300.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kabupaten Kapuas Hulu		33.000.000	APBD II			36.300.000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	Kabupaten Kapuas Hulu	1	33.000.000	APBD II		1	36.300.000
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	Kabupaten Kapuas Hulu	60-70	4.603.596.789	APBD II		60-70	4.695.292.589
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	0	16.300.000	APBD II		0	17.930.000
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.RENSTR 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	Kabupaten Kapuas Hulu	9 Dokumen	1.800.000	APBD II		9 Dokumen	1.980.000
X	XX	1	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1RKA SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	3.000.000	APBD II		1 Dokumen	3.300.000

X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Perubahan RKA SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	2.500.000	APBD II		1 Dokumen	2.750.000
X	XX	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1DPA SKPD 2RUP	Kabupaten Kapuas Hulu	2 Dokumen	2.500.000	APBD II		2 Dokumen	2.750.000
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	Kabupaten Kapuas Hulu	2 Dokumen	2.500.000	APBD II		2 Dokumen	2.750.000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	Kabupaten Kapuas Hulu	7 Dokumen	2.000.000	APBD II		7 Dokumen	2.200.000
X	XX	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	Kabupaten Kapuas Hulu	8 Dokumen	2.000.000	APBD II		8 Dokumen	2.200.000
X	XX	1	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	34	3.958.798.789	APBD II		34	3.986.014.789
X	XX	1	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	14 Dokumen	3.686.638.789	APBD II		14 Dokumen	3.686.638.789
X	XX	1	2.01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPKom 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara)	Kabupaten Kapuas Hulu	4 Dokumen	254.160.000	APBD II		4 Dokumen	279.576.000
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	6 Dokumen	4.000.000	APBD II		6 Dokumen	4.400.000
X	XX	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	7 Dokumen	4.000.000	APBD II		7 Dokumen	4.400.000

X	XX	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	4.000.000	APBD II		1 Dokumen	4.400.000
X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	8.000.000	APBD II		1 Dokumen	8.800.000
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	2.000.000	APBD II		1 Dokumen	2.200.000
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	9	151.363.800	APBD II		9	166.500.180
X	XX	01	2.07	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	Kabupaten Kapuas Hulu	2	1.882.000	APBD II		2	2.070.200
X	XX	01	2.07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	3	14.735.000	APBD II		3	16.208.500
X	XX	1	2.07	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	Kabupaten Kapuas Hulu	2	20.070.800	APBD II		2	22.077.880
X	XX	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	Kabupaten Kapuas Hulu	2	114.676.000	APBD II		2	126.143.600
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	25	471.694.200	APBD II		27	518.863.620
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Kabupaten Kapuas Hulu	200	5.400.000	APBD II		220	5.940.000

X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	Kabupaten Kapuas Hulu	4	71.636.000	APBD II	4	78.799.600
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	Kabupaten Kapuas Hulu	20	4.150.000	APBD II	22	4.565.000
X	XX	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	1	390.508.200	APBD II	1	429.559.020
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	2	5.440.000	APBD II	1	5.984.000
X	XX	01	2.09	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Kapuas Hulu	2	9.000.000	APBD II	1	9.900.000
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Kapuas Hulu	2	5.440.000	APBD II	1	5.984.000
JUMLAH TOTAL									9.446.103.709			10.022.050.201

PLT.KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB.KAPUAS HULU



Handwritten signature of Martha Banang, S.H.M.M.

MARTHA BANANG, S.H.M.M
NIP. 19651123 199203 2 006